

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembentukan suatu pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan negara yang kuat. Dalam rangka mencapai tujuan negara, diperlukan sebuah sistem pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945 demi terjaganya kelangsungan kedaulatan negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan asas hukum. (Halim dan Maria, 2020:49).

Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan.

Kinerja merupakan sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; dan kemampuan kerja. Kinerja (*performance*) merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang

dihasilkan. Kinerja merupakan suatu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi. (Hasibuan, 2012)

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. (Agustina, 2013)

Mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah, yang dilihat dari Laporan Realisasi APBD Kota Medan. Rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah diantaranya adalah : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Growth Ratio atau Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu period ke periode berikutnya. (Mahmudi, 2019:138)

Rasio efektivitas adalah rasio yang menunjukkan keberhasilan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Semakin tinggi Rasio Efektivitas dalam suatu daerah menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif.(Halim, 2012)

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah dalam suatu periode, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut semakin baik. (Mardiasmo,2013:112)

Pemerintah Daerah Kota Medan dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya cenderung belum memenuhi atau melewati target yang telah dianggarkan pada periode 2016 – 2018. Hal ini menggambarkan bahwa adanya penurunan kinerja Pemerintahan Daerah dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan asli daerah yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Demikian pula dengan Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Medan pada tahun 2016-2018 yang mengalami penurunan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah Lain Yang Sah.

Penulis bertujuan melakukan penelitian ini dikarenakan *Growth Ratio* adalah salah satu rasio penting yang perlu diperhatikan, dikarenakan pertumbuhan suatu daerah merupakan cerminan bagaimana Pemerintah Daerah mampu atau tidak dalam merealisasikan pendapatan ataupun belanjanya. Demikian pula Rasio Efektivitas merupakan rasio yang tidak kalah penting dalam pencapaian suatu daerah, karena dari situlah masyarakat dapat melihat apakah Pemerintah Daerah mampu merealisasikan anggaran pendapatannya. Untuk memperoleh ukuran yang

lebih baik, maka rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah.

Penelitian ini juga pernah dilakukan sebelumnya oleh (KS, Lazyra, 2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Medan mengalami penurunan dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan dan meningkatnya belanja daerah melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kondisi diatas, peneliti tertarik untuk meneliti *Growth Ratio*, Rasio Efektivitas dan efisiensi. Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian (Lazyra KS,2016) yang menggunakan 5 Rasio Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan penelitian ini hanya terfokus pada 3 Rasio Kinerja Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dan menguraikan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**Analisis *Growth Ratio*, Rasio Efektivitas dan efisiensi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada penelitian ini, maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2018.
2. Realisasi anggaran tidak efektif karena terjadinya penurunan realisasi APBD

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini dalam menilai Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu hanya menggunakan *Growth Ratio*, Rasio Efektivitas dan efisiensi.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat *Growth Ratio* keuangan Pemerintah Kota Medan pada periode tahun 2016 - 2019 ?
2. Bagaimana tingkat Rasio Efektivitas keuangan Pemerintah Kota Medan pada periode tahun 2016 - 2019 ?
3. Bagaimana tingkat Rasio Efisiensi keuangan Pemerintah Kota Medan pada periode tahun 2016 - 2019 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis *Growth Ratio* selama periode tahun 2016 – 2019.
2. Untuk menganalisis Rasio Efektivitas selama periode tahun 2016 – 2019.
3. Untuk menganalisis Rasio Efisiensi selama periode tahun 2016 – 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

- Menambah pemahaman dan pengetahuan tentang rasio kinerja keuangan daerah, khususnya *Growth Ratio*, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
- Mengetahui informasi terkait bagaimana kinerja keuangan Kota Medan pada periode 2016 – 2019
- Penelitian ini menjadi ruang belajar yang sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik

2. Bagi Pemerintah Kota

- Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan pada periode yang akan datang.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah selama periode 2016 – 2019, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kerjanya.
- Sebagai informasi dan referensi tambahan dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

- Diharapkan bisa menambah referensi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah

- Dapat dijadikan dasar atau acuan serta menambah referensi untuk penelitian terkait kinerja keuangan daerah pada masa yang akan datang.
- Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih dalam oleh peneliti selanjutnya terkait rasio kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Medan khususnya *Growth Ratio*, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi sehingga dapat dijadikan bahan pembandingan.